

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori agensi menjelaskan tentang hubungan antar dua pihak yaitu pemilik (*principal*) dan manajemen (*agent*). Menurut Jensen & Meckling (1976) mendefinisikan teori agensi sebagai kontrak dimana satu orang atau lebih (*principal*) melibatkan orang lain (*agent*) untuk melakukan suatu jasa atas nama *principal* dan memberi wewenang kepada *agent* dalam pengambilan keputusan yang terbaik bagi *principal*. Teori *agency* menyatakan pemegang saham sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen, yang mana dalam penerapannya ada kemungkinan pihak manajemen tidak selalu bertindak demi kepentingan terbaik *principal*.

Teori agensi menggunakan tiga asumsi sifat manusia yaitu: (1) manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*), (2) manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*), dan (3) manusia selalu menghindari resiko (*risk averse*). Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia tersebut manajer sebagai manusia akan bertindak *opportunistic*, yaitu mengutamakan kepentingan pribadinya (Lestari dkk, 2018). Untuk menghindari tindakan-tindakan yang mementingkan diri sendiri, maka sangat penting membuat kontrak yang efisien. Salah satu faktor yang harus dipenuhi suatu kontrak yang efisien dimana agen dan prinsipal memiliki informasi yang sama besarnya (simetris), namun informasi yang

simetris antara manajemen dan pemegang saham tidak pernah ada (Dewi dan Putra, 2016).

Ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh pihak manajemen dan pemegang saham disebut sebagai asimetri informasi. Kondisi ini terjadi karena manajer memiliki informasi yang lebih banyak mengenai perusahaan secara keseluruhan dibandingkan dengan informasi yang diterima oleh investor sehingga hal itu akan mendorong perilaku manajer untuk menyembunyikan beberapa informasi dari investor (Salim dan Marietza, 2017). Asimetri informasi yang terjadi antara pemilik dengan manajemen dapat membuka peluang bagi manajemen untuk melakukan tindakan *earnings management* dalam rangka mengelabui pemilik mengenai kinerja ekonomi perusahaan (Khaiyat, 2015). Manajemen sebagai pihak agen memberikan pertanggungjawabannya kepada pemegang saham (prinsipal) dalam bentuk laporan keuangan. Sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban, maka penting untuk menyajikan laporan keuangan yang berintegritas. (Dewi dan Putra, 2016)

Munculnya masalah agensi yang disebabkan konflik kepentingan dan asimetri informasi tersebut dapat membuat perusahaan menanggung biaya keagenan (*agency cost*). Teori agensi menyatakan bahwa konflik kepentingan dan asimetri informasi yang muncul dapat dikurangi dengan mekanisme pengawasan yang tepat untuk menyelaraskan kepentingan berbagai pihak di perusahaan. Mekanisme pengawasan yang dimaksud dalam teori agensi dapat dilakukan dengan menggunakan mekanisme *corporate governance*.

Penerapan mekanisme *corporate governance* yang baik dapat mengurangi masalah agensi sehingga akan mengurangi kemungkinan kecurangan laporan keuangan sehingga akan meningkatkan integritas laporan keuangan. Laporan keuangan akan memiliki integritas tinggi sehingga dapat menguntungkan pihak perusahaan dan dapat digunakan pihak eksternal untuk pengambilan keputusan. (Putra dan Muid, 2012)

Corporate governance diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan menerima *return* atas dana yang telah mereka investasikan. Penerapan *corporate governance* juga dapat memberikan kepercayaan terhadap kinerja manajemen dalam mengelola kekayaan pemilik (pemegang saham), sehingga dapat meminimalkan konflik kepentingan dan biaya keagenan (*agency cost*). *Corporate governance* menghasilkan berbagai mekanisme yang bertujuan untuk meyakinkan bahwa tindakan manajemen sudah selaras dengan kepentingan pemegang saham. (Yuliana dkk, 2019)

2. Integritas Laporan Keuangan

Menurut Dewi dan Putra (2016) integritas laporan keuangan adalah suatu keadaan dimana laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan menunjukkan informasi tidak bias. Menurut Hardiningsih (2010), apabila seorang auditor mengaudit laporan keuangan yang tidak berintegritas (tidak mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya) maka, peluang seorang auditor untuk dituntut akan semakin besar. Karena apabila laporan keuangan yang tidak berintegritas itu ternyata

laporan keuangan yang *overstate* akan sangat merugikan bagi pengguna laporan keuangan tersebut.

Menurut Sofie (2018), suatu informasi dikatakan bermanfaat untuk pembuatan keputusan, apabila informasi tersebut mengandung dua karakteristik utama, yaitu relevan dan *reliable*. Informasi yang relevan adalah informasi yang dapat berpengaruh pada pengguna untuk menguatkan atau mengubah harapan pengguna laporan keuangan. Informasi dapat dikatakan *reliable* jika informasi yang disajikan tidak membingungkan, bebas dari kesalahan, andal serta dapat dipercaya. Serta menurut Kartika dan Nurhayati (2018) laporan keuangan dikatakan berintegritas apabila laporan keuangan tersebut memenuhi kualitas *reliability* dan sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. *Reliability* memiliki tiga komponen sebagai berikut:

- a. *Verifiability*, artinya dapat diuji kebenarannya.
- b. *Representational faithfulness*, artinya menggambarkan keadaan secara wajar atau sesuai dengan peristiwa yang sebenarnya.
- c. *Neutrality*, artinya informasi akuntansi harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai, tidak bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu.

Menurut Dewi dan Putra (2016), Kartika dan Nurhayati (2018) serta Irawati dan Fakhruddin (2016) integritas laporan keuangan diukur dengan menggunakan indeks *conservatism*.

$$C^{res} = \frac{RP_{it}^{res} + DEPR_{it}^{res}}{NOA_{it}}$$

Dimana:

C_{it} = Indeks *conservatism* perusahaan i pada tahun t .

RP_{it}^{res} = Jumlah biaya riset dan pengembangan yang ada dalam laporan keuangan.

$DEPR_{it}^{res}$ = Biaya depresiasi yang terdapat dalam laporan keuangan.

NOA_{it} = *Net Operating Assets*, yang diukur dengan rumus, kewajiban keuangan bersih : (total hutang + total saham + total dividen) – (kas + total investasi).

Sedangkan menurut Qoyyimah dkk (2015) serta Sofie (2018), integritas laporan keuangan diukur dengan menggunakan konservatisme. Menurut Sofie (2018), konservatisme merupakan prinsip kehati-hatian dalam pelaporan keuangan dimana perusahaan tidak terburu-buru dalam mengakui dan mengukur aset dan laba serta segera mengakui kerugian dan hutang yang mempunyai kemungkinan yang terjadi. Penerapan prinsip ini mengakibatkan pilihan metoda akuntansi yang melaporkan laba atau aset yang lebih rendah serta melaporkan hutang lebih tinggi. Dalam konsep ini, beban diakui lebih cepat dan pendapatan diakui lebih lambat, sehingga *net income* terlihat rendah. Selanjutnya, konservatisme akan menyebabkan pelaporan keuangan yang pesimistik, hal tersebut akan mengurangi optimisme dari pengguna laporan. Tujuan dari penggunaan konsep konservatisme adalah untuk menetralkan optimisme para usahawan yang terlalu berlebihan dalam melaporkan hasil usahanya. Penerapan konsep konservatisme akan menghasilkan laba yang berfluktuatif, dimana laba yang berfluktuatif akan

mengurangi daya prediksi laba untuk memprediksi aliran kas pada masa depan.

Menurut Qoyyimah (2015), konservatisme diukur dengan menggunakan *dummy* yaitu (1) konservatisme dan (0) optimis.

Earning/accrual measures

$$C_{it} = NI_{it} - CF_{it}$$

Dimana:

C = Tingkat konservatisme

NI = *Net Income* (laba bersih dikurangi depresiasi dan amortisasi)

CF = *Cash Flows from operations* (arus kas dari kegiatan operasional)

Apabila selisih antara laba bersih dan arus kas bernilai negatif, maka laba digolongkan konservatif dan jika selisih laba bersih dan arus kas bernilai positif, maka digolongkan optimis. Hal ini disebabkan karena perusahaan menggunakan konservatisme dalam menentukan pengukuran yang digunakan dalam laporan keuangannya.

Sedangkan menurut Andreas dkk (2017), konservatisme akuntansi menggunakan perhitungan total akrual, yaitu sebagai berikut:

$$KA_{it} = ((NI_{it} + DEP) - CFO_{it})(-1)$$

Dimana:

KA_{it} = Konservatisme akuntansi perusahaan i pada tahun t.

NI_{it} = *Net Income* (laba bersih sebelum *extraordinary item* perusahaan i pada tahun t).

DEP_{it} = Biaya Depresiasi perusahaan i pada tahun t.

CFO_{it} = *Cash Flow from Operations* (arus kas dari kegiatan operasional perusahaan i pada tahun t).

Adapula menurut Qonitin dkk (2018), pengukuran integritas laporan keuangan menggunakan rumus:

$$CONN_ACC = ((NI_{i,t} - Dep_{i,t}) - CFO_{i,t})$$

Dimana:

CONNACC = Tingkat konservatisme akuntansi

NI = *Net Income* (Laba bersih)

DEP = Biaya depresiasi

CFO = *Cash Flows Operation*

Berbeda halnya dengan Maghfiroh dkk (2018) (Dikembangkan oleh Givoly dan Hayn (2000)), integritas laporan keuangan dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$KON = \frac{NI+DEP-CFO}{TA} x - 1$$

Dimana:

KON = Tingkat konservatisme akuntansi

NI = *Net Income* (laba bersih sebelum *extraordinary item*)

DEP = Biaya Depresiasi

CFO = *Cash Flows Operating* (arus kas operasi)

TA = Total Asset

3. Manajemen Laba

Sulistiyanto (2008: 48), terdapat beberapa pengertian manajemen laba menurut para ahli, sebagai berikut:

1. Davidson, Stickney dan Weil (1987)

Manajemen laba merupakan proses untuk mengambil langkah tertentu yang disengaja dalam batas-batas prinsip akuntansi berterima umum untuk menghasilkan tingkat yang diinginkan dari laba yang dilaporkan.

2. Schipper (1989)

Manajemen laba adalah campur tangan dalam proses penyusunan pelaporan keuangan eksternal, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi (pihak yang tidak setuju mengatakan bahwa hal ini hanyalah upaya untuk memfasilitasi operasi yang tidak memihak dari sebuah proses.

3. *National Association of Certified Fraud Examiners* (1993)

Manajemen laba adalah kesalahan atau kelalaian yang disengaja dalam membuat laporan mengenai fakta material atau data akuntansi sehingga menyesatkan ketika semua informasi itu dipakai untuk membuat pertimbangan yang akhirnya akan menyebabkan orang yang membacanya akan mengganti atau mengubah pendapat atau keputusannya.

4. Fisher dan Rosenzweig (1995)

Manajemen laba adalah tindakan-tindakan manajer untuk menaikkan (menurunkan) laba periode berjalan dari sebuah perusahaan yang

dikelolanya tanpa menyebabkan kenaikan (penurunan) keuntungan ekonomi perusahaan jangka panjang.

5. Healy dan Wahlen (1999)

Manajemen laba muncul ketika manajer menggunakan keputusan tertentu dalam pelaporan keuangan dan mengubah transaksi untuk mengubah laporan keuangan untuk menyesatkan stakeholder yang ingin mengetahui kinerja ekonomi yang diperoleh perusahaan atau untuk mempengaruhi hasil kontrak yang menggunakan angka-angka akuntansi yang dilaporkan itu. (Sulistyanto, 2008 : 48).

Adapun menurut Obigbemi, dkk (2016) manajemen laba adalah upaya yang disengaja untuk sampai pada tingkat yang diinginkan dari pembelajaran menggunakan cara yang berbeda, yang dianggap sebagai praktik yang tidak etis. Manajemen laba dapat mengambil banyak bentuk dan mencakup banyak tindakan curang sebagai hasil dari penggunaan penilaian oleh manajer dalam pelaporan keuangan. Manajemen laba meluas hingga mencakup manipulasi selain dari pilihan akuntansi untuk mencapai tujuan konsisten dengan gagasan manajemen laba. Manajemen laba melibatkan persiapan laporan keuangan sesuai dengan apa yang berkorelasi dengan upaya manajer, seperti meningkatkan nilai perusahaan dan akuntan. Fleksibilitas peraturan akuntansi memudahkan manajer untuk mengelola pendapatan. Menurut Gunny (2005) dalam (Obigbemi, dkk 2016), manajemen laba diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yaitu: penipuan akuntansi, manajemen akrual, dan manajemen pendapatan nyata. Akuntansi penipuan melibatkan pilihan akuntansi yang

melanggar GAAP (*Generally Accepted Accounting Principles*), manajemen akrual melibatkan penggunaan diskresi dalam penyajian elemen akrual dalam laporan keuangan. Sedangkan manajemen laba riil melibatkan penggunaan kebijaksanaan dalam mengubah kegiatan operasional reguler organisasi untuk mencapai tujuan tertentu.

Sifat akuntansi akrual memberi manajer banyak keleluasaan dalam menentukan laba akrual yang dilaporkan perusahaan dalam periode tertentu. Praktik yang paling umum adalah memanipulasi waktu pengeluaran seperti biaya iklan atau pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan. Ada dua jenis manajemen laba yaitu, manajemen laba oportunistik dan informatif. Manajemen laba oportunistik berarti bahwa manajer berusaha menyesatkan investor dengan mengejar kepentingan manajemen. Jenis manajemen laba ini digunakan oleh manajer untuk mencapai tujuan pribadi dengan merugikan tujuan organisasi dan pemangku kepentingan lainnya. Sedangkan jenis manajemen laba informatif bertujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan, melalui manajer dengan mengungkapkan kepada para investor harapan mereka tentang arus kas masa depan perusahaan. Literatur tentang manajemen laba oportunistik berasal dari Healy (1985), ketika ditemukan bahwa manajer menggunakan akrual untuk secara strategis memanipulasi pendapatan bonus. Jika manajer percaya bahwa dewan memandang kenaikan pendapatan secara positif, mereka dapat bertindak secara oportunis dengan memilih kebijakan akuntansi yang meningkatkan pendapatan. Manajemen laba mungkin juga bersifat informatif, dimana bertujuan memaksimalkan

nilai perusahaan, yang melibatkan kebijaksanaan oleh manajer dalam pengungkapan ekspektasi pribadi investor tentang arus kas masa depan perusahaan yang dapat meningkatkan citra publik perusahaan, dengan demikian memungkinkan kekuatan permintaan dan penawaran memainkan peran utama dalam meningkatkan nilai saham perusahaan. Dibawah bentuk manajemen laba ini, pemegang saham memperoleh keuntungan karena digunakan untuk memberi sinyal informasi pribadi manajer (Obigbemi, dkk (2016).

Sedangkan menurut Perdana (2018) manajemen laba merupakan intervensi manajemen dalam proses penyusunan laporan keuangan untuk pihak eksternal, intervensi tersebut berupa kebijakan meratakan, menaikkan, atau menurunkan pelaporan laba. Manajemen dapat memanfaatkan kelonggaran di dalam penggunaan metode akuntansi, dan membuat kebijakan-kebijakan (*discretionary*) yang dapat mempercepat pengakuan pendapatan atau menunda pengakuan biaya, agar laba perusahaan yang dilaporkan menjadi lebih kecil atau lebih besar sesuai dengan yang diharapkan.

Adapun menurut Yuliana dkk (2019), manajemen laba merupakan cara yang digunakan manajer untuk mempengaruhi angka laba secara sistematis dan sengaja dengan cara pemilihan kebijakan akuntansi dan prosedur akuntansi yang ada dan secara ilmiah dapat memaksimalkan utilitas atau nilai pasar perusahaan.

Scott (2015) menjelaskan bahwa terdapat beberapa pola atau bentuk pelaksanaan manajemen laba diantaranya yaitu:

1. *Taking a Bath*

Dalam pola ini, manajemen harus menghapus beberapa aktiva dan dapat membebaskan perkiraan biaya yang akan datang pada laporan saat ini. Selain itu, manajemen ini juga harus melakukan *clear the desk*, sehingga laba yang dilaporkan pada periode yang akan datang meningkat.

2. *Income Minimization*

Pola ini dilakukan pada saat profitabilitas pada perusahaan sangat tinggi agar tidak mendapat perhatian secara politis. Tindakan yang dilakukan yaitu berupa penghapusan pada barang modal dan aktiva tak berwujud, biaya iklan, serta pengeluaran untuk suatu penelitian dan pengembangan.

3. *Income Maximization*

Teknik ini dilakukan dengan cara memaksimalkan laba, tujuannya yaitu untuk memperoleh bonus yang lebih besar. Tindakan ini juga dapat dilakukan untuk menghindari suatu pelanggaran atas kontrak hutang jangka panjang (*debt covenant*).

4. *Income Smoothing*

Teknik ini dilakukan dengan cara melaporkan trend suatu pertumbuhan laba yang stabil, dibanding perubahan laba yang meningkat atau menurun secara drastis.

5. *Timing Revenue and Expenses Recognition*

Teknik ini dapat dilakukan dengan cara membuat kebijakan yang berkaitan dengan timing suatu transaksi, contohnya seperti pengakuan premature atas pendapatan.

Khatijah (2019), terdapat tiga hipotesis dalam teori akuntansi positif yang digunakan untuk menguji perilaku etis seseorang dalam mencatat transaksi dan penyusunan laporan keuangan, yaitu:

1. *Bonus Plan Hypothesis*

Manajemen akan memilih suatu metode akuntansi yang memaksimalkan utilitasnya yakni bonus yang tinggi. Manajemen perusahaan ini memberikan besar berdasarkan laba lebih banyak menggunakan metode akuntansi yang meningkatkan laba yang dilaporkan.

2. *Debt to Equity Hypotesis*

Manajemen yang melakukan suatu pelanggaran perjanjian kredit cenderung memilih metode yang dapat meningkatkan laba. Hal tersebut bertujuan untuk bisa menjaga reputasi dalam pandangan pihak eksternal.

3. *Political Cost Hypotesis*

Semakin besar perusahaan maka akan semakin besar pula kemungkinan perusahaan untuk memilih metode akuntansi yang menurunkan laba. Karena jika menggunakan laba yang tinggi, maka pemerintah akan mengambil suatu tindakan seperti menaikkan pajak pendapatan perusahaan, mengenakan peraturan *antitrust* dan lain sebagainya.

Manajemen laba dapat dideteksi dengan menggunakan beberapa model perhitungan, salah satunya adalah *Modified Jones Model* yang mengukur nilai akrual diskresioner yang diproksikan dalam bentuk nilai *error term* dari persamaan regresi total akrual. Akrual diskresioner merupakan kebijakan akuntansi yang memberikan keleluasaan pada manajemen untuk menentukan jumlah transaksi akrual secara fleksibel. Manajemen memanipulasi laba yang dilaporkan dengan memanfaatkan transaksi akrual diskresioner (Perdana, 2018).

Langkah I: Menghitung nilai total akrual (TAC) yang merupakan selisih dari pendapatan bersih (*net income*) dengan arus kas operasi untuk setiap perusahaan dan setiap tahun pengamatan.

$$TAC = Net\ Income - Cash\ Flows\ from\ Operations..... (1)$$

Langkah II: Menghitung nilai accruals yang diestimasi dengan persamaan regresi OLS (*Ordinary Least Square*).

$$\frac{TAC_{i,t}}{TA_{i,(t-1)}} = \beta_0 \frac{1}{TA_{i,(t-1)}} + \beta_1 \frac{\Delta Rev_{i,t}}{TA_{i,(t-1)}} + \beta_2 \frac{PPE_{i,t}}{TA_{i,(t-1)}} + e \dots (2)$$

Langkah III: Menghitung nilai *Nondiscretionry* total accrual (NDA)

$$NDA_{i,t} = \beta_0 \frac{1}{TA_{i,(t-1)}} + \beta_1 \frac{\Delta Rev_{i,t} - \Delta TR_{i,t}}{TA_{i,(t-1)}} + \beta_2 \frac{PPE_{i,t}}{TA_{i,(t-1)}}$$

Langkah IV: Menghitung nilai *Discretionary Accruals* (DAC)

$$DAC = \frac{TAC_{i,t}}{TA_{i,(t-1)}} - NDA_{i,t}$$

Keterangan:

$TAC_{i,t}$ = Total akrual perusahaan i periode t.

TA_{t-1} = Total aset untuk perusahaan i periode tahun sebelumnya.

$Rev_{i,t}$ = Perubahan jumlah pendapatan perusahaan i periode t.

$PPE_{i,t}$ = Aktiva tetap (*gross property, plant, and equipment*) perusahaan i periode t.

$NDA_{i,t}$ = *Nondiscretionary accrual* pada tahun t.

TRi,t = Perubahan piutang dagang perusahaan i periode t.

β = *Fitted coefficient* yang diperoleh dari hasil regresi pada perhitungan total akrual.

DAC = *Discretionary accruals* (DAC)

4. Corporate Governance

Menurut Effendi (2016), *Corporate governance* dapat didefinisikan sebagai struktur, sistem, dan proses yang digunakan oleh organisasi perusahaan sebagai upaya untuk memberikan nilai tambah perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan norma yang berlaku. Sedangkan menurut Maghfiroh dkk (2018), mekanisme *corporate governance* adalah upaya dan usaha yang dilakukan oleh perusahaan agar dapat melakukan pengendalian kegiatan organisasi atau perusahaan sehingga dapat meningkatkan keberhasilan usaha dengan pembagian tugas yang berbeda yang dilakukan oleh organ perusahaan.

Corporate governance atau tata kelola perusahaan yang baik dapat diartikan sebagai suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan

dengan tujuan menciptakan nilai tambah bagi setiap *stakeholders*. Disebutkan juga ada dua hal yang ditekankan dalam mekanisme *corporate governance* yang pertama pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat waktu, dan kedua kewajiban perusahaan adalah melakukan pengungkapan secara akurat, tepat waktu dan transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan *stakeholder* (Effendi, 2016).

Berdasarkan definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa *corporate governance* adalah suatu struktur yang mengatur dan mengendalikan hubungan berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholder*), pemegang saham demi tercapai tujuan perusahaan. Pengendalian bertujuan untuk membuat sesuatu terjadi sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Terdapat lima prinsip yang menjadi dasar penerapan *good corporate governance*, antara lain:

1. Transparansi (*Transparency*)

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

3. Responsibilitas (*Responsibility*)

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

4. Independensi (*Independency*)

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

5. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Prinsip-prinsip *corporate governance* tersebut perlu untuk diterapkan untuk terselenggaranya tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Mekanisme *corporate governane* yang diprosikan dengan

komisaris independen, komite audit, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial. (KNKG, 2006)

a. Komisaris Independen

Mengenai komisaris independen, ketentuan serta definisinya secara umum terdapat dalam Pasal 120 UUPK 40/2007 beserta penjelasannya yang menyatakan bahwa komisaris independen adalah komisaris dari “pihak luar”. Sementara yang dimaksud sebagai “pihak luar” adalah pihak yang tidak terafiliasi dengan pengendali calon emiten, pemegang saham utama, dan/atau dengan direksi dan komisaris lainnya. Pada perusahaan tertutup, UUPK 40/2007 sudah memberikan ruang dipilihnya komisaris independen, sebagai bagian dari dewan komisaris yang mengawasi kepengurusan, oleh direksi. Tujuan keberadaan komisaris independen dalam suatu perusahaan adalah sebagai penyeimbang agar tidak seluruh keputusan dan kebijakan perusahaan semata-mata untuk kepentingan pemegang saham pengendali atau pemegang saham mayoritas. Dengan adanya komisaris independen diharapkan kepentingan pemegang saham minoritas juga terlindungi. Jika bagi perusahaan tertutup adanya komisaris independen ini bukan kewajiban dan lebih merupakan pemenuhan dari asas *good corporate governance* (GCG), bagi perusahaan terbuka penjawantahan asas GCG tersebut telah dituangkan dalam suatu peraturan positif. Dengan demikian, keberadaan komisaris independen merupakan suatu syarat (kewajiban) agar perusahaan calon emiten tersebut dapat dicatatkan di lantai bursa

(Sutantoputra dan Simangunsong, 2018 : 35). Jumlah komisaris independen wajib paling kurang 30% dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris (Qonitin dkk, 2018).

Sedangkan menurut Hery (2017:41) dewan komasaris independen merupakan salah satu mekanisme *corporate governance* yang diperlukan untuk mengurangi *agency problem* antara pemilik dan manajer sehingga timbul keselarasan kepentingan antara pemilik perusahaan dan manajer. Dengan adanya keselarasan kepentingan tersebut maka diharapkan tidak menimbulkan *agency cost* yang dapat menyebabkan kondisi kesulitan keuangan bagi perusahaan.

Terdapat beberapa indikator pengukuran komisaecis independen, diantaranya menurut Qonitin dkk (2018) pengukuran proporsi dewan komisaris independen dapat dihitung menggunakan rumus :

$$PDKI = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Dewan Komisaris}} \times 100\%$$

Keterangan :

PDKI : Proporsi Dewan Komisaris Independen

Satuan dari hasil pengukuran ini adalah persentase.

Sedangkan menurut Maghfiroh dkk (2018), Akram dkk (2017), Dewi dan Putra (2016) serta Istiantoro dkk (2017), komisaris independen diukur dengan rumus:

$$PDKI = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Dewan Komisaris}}$$

Keterangan:

PDKI : Proporsi Dewan Komisaris Independen

Satuan dari pengukuran ini adalah nominal.

b. Komite Audit

Komite audit yaitu dewan komisaris perusahaan besar dan diperdagangkan secara publik membentuk sebuah subkomite yang bertanggungjawab khusus mengenai audit. Komite ini biasanya terdiri atas tiga orang, dan haruslah orang luar (tidak berkaitan dengan keluarga pihak manajemen eksekutif serta pejabat yang dulu di perusahaan, dan sebagainya). Dengan kebangkitan Undang-undang *Sarbanes-Oxley Act*, paling tidak salah satu dari anggota komite tersebut haruslah seorang “pakar keuangan”. Komite audit dapat membantu pihak manajemen dalam memastikan integritas laporan keuangan dan mencegah penipuan. Komite audit berfungsi sebagai “pemeriksa dan penyeimbang” yang independen untuk fungsi audit internal dan perantara dengan para auditor eksternal. Secara umum, komite audit menjadi sumber perlindungan independen aktiva entitas terkait dari berbagai jenis risiko, dalam cara apapun yang tepat. (Samsul, 2006: 72)

Sedangkan menurut Sulistyanto (2008:155) komite audit merupakan pihak yang mempunyai tugas untuk membantu komisaris dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan dan peningkatan efektivitas internal dan eksternal audit. Serta menurut Qonitin dkk (2018) berdasarkan Keputusan Ketua Bapepem-LK No. KEP-643/BL/2012, komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggungjawab

kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Komite audit diketuai oleh seorang komisaris independen. Komite audit paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari komisaris independen dan pihak luar emiten atau perusahaan publik.

Adapun pengertian komite audit menurut Saksakotama dan Cahyonowati (2014) komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan direksi yang bertugas melaksanakan pengawasan independen atas proses laporan keuangan dan audit ekstern. Komite audit memiliki tanggung jawab dalam hal mengawasi audit laporan keuangan, memastikan terpenuhinya standar dan kebijaksanaan keuangan, memeriksa kesesuaian laporan keuangan dengan standar dan kebijaksanaan, serta memastikan laporan keuangan yang dibuat telah konsisten dengan informasi lain yang diketahui oleh anggota komite audit.

Bursa Efek Indonesia (BEI) mewajibkan perusahaan tercatat memiliki komite audit. Keanggotaan komite audit sekurang-kurangnya tiga anggota dan salah satu diantara komisaris independen perusahaan tercatat tersebut juga menjadi ketua komite. Selain itu, diharuskan ada anggota yang berasal dari pihak ekstern yang independen dan sekurang-kurangnya salah seorang memiliki kemampuan di bidang akuntansi dan keuangan. Komite audit bertugas membantu dewan komisaris untuk

memonitor proses pelaporan keuangan oleh manajemen untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan (Samsul, 2006: 72).

Terdapat beberapa pengukuran komite audit dalam suatu perusahaan diantaranya sebagai berikut:

Menurut Qonitin dkk (2018) serta Istiantoro dkk (2017) indikator pengukuran komite audit sebagai berikut :

$$KA = \frac{\text{Jumlah Komite Audit dari Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Komite Audit}} \times 100\%$$

Keterangan :

KA : Komite Audit

Satuan dari hasil pengukuran tersebut adalah persentase.

Sedangkan menurut Maghfiroh dkk (2018) serta Irawati dan Fakhrudin (2016), pengukuran komite audit menggunakan proporsi komite audit, yaitu jumlah komite audit yang berada dalam perusahaan.

Berbeda halnya dengan Dewi dan Putra (2016), pengukuran komite audit dihitung dengan membandingkan jumlah komite audit terhadap total jumlah komisaris.

$$KA = \frac{\text{Jumlah komite audit}}{\text{Jumlah komisaris}}$$

Satuan dalam pengukuran ini adalah nominal.

c. **Kepemilikan Institusional**

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dana perwalian, dan institusi lainnya pada akhir tahun. Salah satu

faktor yang dapat memengaruhi kinerja perusahaan adalah kepemilikan institusional. Adanya kepemilikan institusional di suatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan agar lebih optimal terhadap kinerja manajemen, karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap kinerja manajemen. Pengawasan yang dilakukan oleh investor institusional sangat bergantung pada besarnya investasi yang dilakukan. (Subagyo dkk, 2018 : 47).

Sedangkan menurut Hery (2017:41) kepemilikan institusional merupakan persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh badan hukum atau institusi keuangan, seperti perusahaan asuransi, dana pensiun, reksadana, bank, dan institusi lainnya. Dengan adanya kepemilikan institusional, para pemangku kepentingan cenderung akan lebih percaya terhadap perusahaan, dan hal ini dapat menjadi nilai tambah tersendiri bagi perusahaan tersebut. Dengan adanya kepemilikan institusional yang semakin besar, maka pengawasan terhadap manajemen dalam melaksanakan kegiatan (tanggung jawab) operasionalnya dapat dilakukan secara lebih efektif oleh pihak institusi sehingga hal ini akan menyebabkan semakin besar tingkat integritas laporan keuangan suatu perusahaan. Adanya kepemilikan institusional dapat mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Pengawasan tersebut akan menjamin manajer bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik

perusahaan, bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri (Hery, 2017 : 41).

Terdapat beberapa pengukuran kepemilikan institusional diantaranya:

Menurut Istiantoro dkk (2017), Qonitin dkk (2018), Mudasetia dan Sholihah (2017) serta Maghfiroh dkk (2018) dapat dihitung menggunakan rumus :

$$KI = \frac{\text{Jumlah Saham yang Dimiliki Institusi}}{\text{Jumlah Saham yang Beredar}} \times 100\%$$

Keterangan :

KI : Kepemilikan institusional

Satuan pengukuran ini adalah persentase.

Sedangkan menurut Akram dkk (2017) serta Dewi dan Putra (2016), pengukuran kepemilikan institusional dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$KI = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki institusi}}{\text{Jumlah saham yang beredar}}$$

d. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan yang diukur dengan presentase jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen. Struktur kepemilikan manajerial dapat dijelaskan melalui dua sudut pandang, yaitu pendekatan keagenan dan pendekatan ketidakseimbangan. Pendekatan keagenan menganggap struktur kepemilikan manajerial sebagai suatu instrumen atau alat yang

digunakan untuk mengurangi konflik keagenan diantara beberapa klaim terhadap sebuah perusahaan. Pendekatan ketidakseimbangan informasi memandang mekanisme struktur kepemilikan manajerial sebagai suatu cara untuk mengurangi ketidakseimbangan informasi antara insider dengan outsider melalui pengungkapan informasi di dalam perusahaan. (Subagyo dkk, 2018 : 46-47).

Terdapat beberapa pengukuran kepemilikan manajerial diantaranya sebagai berikut:

Menurut Maghfiroh dkk (2018) serta Istiantoro dkk (2017) pengukuran proporsi kepemilikan manajerial dapat dihitung menggunakan rumus :

$$KM = \frac{\text{Jumlah Saham yang Dimiliki Manajemen}}{\text{Jumlah Saham yang Beredar}} \times 100\%$$

Keterangan :

KM : Kepemilikan Manajerial

Satuan pengukuran ini adalah persentase.

Sedangkan menurut Akram dkk (2017) serta Dewi dan Putra (2016), pengukuran kepemilikan manajerial dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$KM = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki manajemen}}{\text{Jumlah saham yang beredar}}$$

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Berikut ini daftar beberapa hasil penelitian terdahulu yang ditampilkan dalam bentuk tabel sebagai berikut.

Tabel 2.1 Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Penulis & Tahun	Variabel yang Digunakan	Hasil
1.	Akram, Basuki dan Budiyanto (2017)	Variabel Dependen: Integritas Laporan Keuangan Variabel independen: <i>corporate governance</i> , kualitas audit, ukuran perusahaan dan <i>leverage</i>	1. Kepemilikan institusional dan komite audit berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan. 2. Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap integritas laporan keuangan. 3. Komisaris independen tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.
2.	Dewi dan Putra (2016)	Variabel dependen: Integritas laporan keuangan Variabel independen: <i>corporate governance</i>	1. Kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan komisaris independen berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan. 2. Komite audit tidak berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan.
3.	Irawati, Linda dan Fakhruddin, Iwan (2016)	Variabel dependen: integritas laporan keuangan Variabel independen: <i>corporate governance</i>	1. Komite audit tidak berpengaruh positif signifikan terhadap integritas laporan keuangan. 2. Komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap integritas laporan keuangan. 3. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh positif signifikan terhadap integritas laporan keuangan.
4.	Istiantoro, Paminto	Variabel dependen:	1. Kepemilikan institusional

	dan Ramadhani (2017)	integritas laporan keuangan Variabel independen: struktur <i>corporate governance</i>	berpengaruh negatif terhadap integritas laporan keuangan. 2. Kepemilikan manajerial dan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. 3. Komite audit berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan.
5.	Khatijah (2019)	Variabel dependen: integritas laporan keuangan Variabel independen: <i>good corporate governance</i> dan manajemen laba	1. Kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan manajemen laba tidak berpengaruh secara signifikan terhadap integritas laporan keuangan. 2. Komisaris independen dan komite audit berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan.
6.	Lestari, Harimurti, dan Widarno (2018)	Variabel dependen: integritas laporan keuangan Variabel independen: struktur <i>corporate governance</i>	1. Komisaris independen, komite audit, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.
7.	Lubis, Fujianti dan Amyulianthy (2018)	Variabel dependen: integritas laporan keuangan Variabel independen: ukuran KAP, ukuran perusahaan dan manajemen laba	1. Manajemen laba berpengaruh negatif signifikan terhadap integritas laporan keuangan.
8.	Maghfiroh, Sukarmanto, dan Purnamasari (2018)	Variabel dependen: integritas laporan keuangan Variabel independen: mekanisme <i>good corporate governance</i> dan independensi auditor	1. Komisaris independen, komite audit, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.
9.	Mais dan Nuari (2016)	Variabel dependen: integritas laporan	1. Komisaris independen berpengaruh positif

		keuangan Variabel independen: <i>good corporate governance</i> , ukuran perusahaan dan <i>leverage</i>	terhadap integritas laporan keuangan. 2. Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap integritas laporan keuangan.
10.	Monica, Fitria dan Wenny, Cherrya Dhia (2016)	Variabel dependen: integritas laporan keuangan Variabel independen: struktur <i>corporate governance</i> , ukuran KAP dan ukuran perusahaan	1. Kepemilikan institusional, komite audit dan komisaris independen berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan. 2. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.
11.	Mudasetia dan Sholihah (2017)	Variabel dependen: integritas laporan keuangan Variabel independen: mekanisme <i>corporate governance</i> dan kualitas audit	1. Kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit, dan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap laporan keuangan.
12.	Priharta (2017)	Variabel dependen: integritas laporan keuangan Variabel independen: <i>corporate governance</i>	1. Kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap integritas laporan keuangan. 2. Komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap integritas laporan keuangan.
13.	Putra dan Muid (2012)	Variabel dependen: integritas laporan keuangan Variabel independen: mekanisme <i>corporate governance</i> , kualitas audit dan manajemen laba	1. Komisaris independen, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh secara signifikan terhadap integritas laporan keuangan. 2. Komite audit dan manajemen laba berpengaruh positif secara signifikan terhadap integritas laporan keuangan.
14.	Putri, Fatahurrazka	Variabel dependen:	1. Komisaris Independen,

	dan Wira (2017)	integritas laporan keuangan Variabel independen: komisaris independen, kepemilikan institusi, komite audit, kualitas audit dan manajemen laba	kepemilikan institusional, dan komite audit tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan. 2. Manajemen laba memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap integritas laporan keuangan.
15.	Qonitin dan Yudowati (2018)	Variabel dependen: integritas laporan keuangan Variabel independen: mekanisme <i>corporate governance</i> dan kualitas audit	1. Kepemilikan institusional dan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan. 2. Komite audit berpengaruh negatif terhadap integritas laporan keuangan.
16.	Qoyyimah, Kholmi dan Harventy (2015)	Variabel dependen: integritas laporan keuangan Variabel independen: struktur <i>corporate governance</i> , <i>audit tenure</i> dan ukuran KAP	1. Komisaris independen, komite audit, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.
17.	Saksakotama dan Cahyonowati (2014)	Variabel dependen: integritas laporan keuangan	1. Kepemilikan manajerial, komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap integritas laporan keuangan. 2. Komite audit pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap integritas laporan keuangan.
18.	Sari dan Rahayu (2014)	Variabel dependen: integritas laporan keuangan Variabel independen: independensi auditor, mekanisme <i>corporate governance</i> , kualitas audit dan manajemen laba	1. Komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan komite audit tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan. 2. Manajemen laba berpengaruh negatif

			terhadap integritas laporan keuangan.
19.	Setiawan (2016)	Variabel dependen: integritas laporan keuangan Variabel independen: mekanismen <i>corporate governance</i> , audit tenure dan ukuran perusahaan	1. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. 2. Kepemilikan manajerial, komite audit dan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap integritas laporan keuangan.
20.	Siregar (2014)	Variabel dependen: integritas laporan keuangan Variabel independen: komite audit, komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, independensi, kualitas audit, ukuran perusahaan, manajemen laba dan <i>leverage</i>	1. Komite audit, komisaris independen dan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan. 2. Kepemilikan manajerial, manajemen laba dan berpengaruh negatif terhadap integritas laporan keuangan.
21.	Sukanto dan Widaryanti (2018)	Variabel dependen: integritas laporan keuangan Variabel independen: ukuran KAP dan tata kelola perusahaan	1. Kepemilikan institusional memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap integritas laporan keuangan. 2. Komite audit, Komisaris independen, kepemilikan manajemen tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.
22.	Verya (2017)	Variabel dependen: integritas laporan keuangan Variabel independen: ukuran perusahaan, <i>leverage</i> dan <i>good corporate governance</i>	1. Komisaris independen, komite audit, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan.
23.	Yuliana, Masitoh dan Rachmawati (2019)	Variabel dependen: integritas laporan keuangan	1. Kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan manajemen laba tidak

		Variabel independen: <i>good corporate governance</i> dan manajemen laba	berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. 2. Komite audit berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan. 3. Komisaris independen berpengaruh negatif terhadap integritas laporan keuangan.
--	--	---	---

C. Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

1. Pengaruh Manajemen Laba terhadap Integritas Laporan Keuangan

Manajemen laba merupakan setiap tindakan yang dilakukan manajemen yang dapat mempengaruhi laba yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Manajemen laba berkaitan dengan teori agensi. Jensen dan Meckling (1976) menyebutkan hubungan keagenan sebagai kontrak di antara *principal* (pemegang saham) dan *agen* (manajer) dimana *principal* mendelegasikan pengambilan keputusan kepada *agen*. Manajemen laba ditimbulkan oleh adanya asimetri informasi antara *principal* (investor) dan *agent* (manajemen) yang mana manajemen mempunyai informasi yang lebih tentang kinerja dan kondisi perusahaan (Yuliana dkk, 2019). Sebagai agen, manajer secara moral bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik (*principal*) dan sebagai imbalannya akan memperoleh bonus atas pekerjaan yang dilakukan. Agar manajer mendapatkan bonus atas pekerjaannya, manajer akan melakukan manajemen laba karena laba merupakan penilaian kinerja manajer. Dengan demikian terdapat dua kepentingan yang berbeda di dalam perusahaan dimana masing-masing pihak berusaha untuk mencapai

atau mempertahankan tingkat kemakmuran yang diharapkan (Salim dan Marietza, 2017).

Secara konseptual, manajemen perusahaan dapat memanfaatkan asimetri informasi antara manajemen dengan investor untuk melakukan praktik manajemen laba terhadap informasi laba yang dilaporkan sebelum penawaran saham tambahan dilakukan. Praktik manajemen laba tersebut dilakukan dengan cara menaikkan nilai akrual diskresioner (Perdana, 2018).

Ketidakmampuan pihak manajemen dalam mencapai target laba yang ditentukan, sehingga manajemen memanfaatkan fleksibilitas yang sesuai dengan standar akuntansi dalam menyusun laporan keuangan untuk memanipulasi laba yang dilaporkan. Manajemen termotivasi untuk memperlihatkan kinerja keuangan yang baik dalam menghasilkan nilai atau keuntungan maksimal bagi perusahaan sehingga manajemen cenderung menggunakan dan memilih penerapan standar akuntansi yang dapat memberikan informasi laba yang baik yang menyebabkan kurangnya integritas laporan keuangan. Sehingga adanya manajemen laba mempengaruhi integritas laporan keuangan. (Perdana, 2018)

Manajemen laba diproksikan dengan *Discretionary Accrual*, perusahaan yang melakukan *fraud* memiliki *discretionary accruals* yang lebih besar dibandingkan perusahaan yang tidak melakukan *fraud* pada periode tiga tahun sebelum terjadinya *fraud*. Dengan kata lain, perusahaan yang memiliki integritas laporan keuangan yang tinggi maka memiliki

discretionary accruals yang rendah. Atau sebaliknya. (Salim dan Marietza, 2017)

Hasil penelitian Siregar (2014), Sari, dkk (2014), serta Lubis, dkk (2018) menunjukkan bahwa manajemen laba berpengaruh negatif terhadap integritas laporan keuangan. Berdasarkan pengembangan teori dan hasil penelitian terdahulu, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Manajemen laba berpengaruh negatif terhadap integritas laporan keuangan.

2. Pengaruh Komisaris Independen terhadap Integritas Laporan Keuangan

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan/atau hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya, direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Keberadaan komisaris independen dalam suatu perusahaan dapat menjadi penyeimbang dalam pengambilan keputusan khususnya dalam rangka perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan pihak-pihak lain yang terkait. Komisaris yang berasal dari luar tidak memiliki kepentingan terhadap pihak internal perusahaan, akan melakukan pengawasan lebih independen. Hal tersebut mendorong pengawasan yang lebih efektif terhadap perusahaan sehingga kesempatan untuk melakukan tindakan

kecurangan karena adanya *agency problem* dapat dicegah sehingga akan meningkatkan integritas laporan keuangan (Darmawan, 2018).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Priharta (2017), Verya (2017), Dewi dan Putra (2016) serta Irawati dan Fakhruddin (2016) menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan. Berdasarkan pengembangan teori dan hasil penelitian terdahulu, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂ : *Komisaris independen berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan.*

3. Pengaruh Komite Audit terhadap Integritas Laporan Keuangan

Teori agensi menjelaskan bahwa setiap individu lebih mengutamakan kepentingannya sendiri karena pada dasarnya sifat manusia sebagai makhluk individu sehingga menyebabkan konflik kepentingan antara *principal* dengan *agent*. Perbedaan kepentingan ini menimbulkan permasalahan yang sering disebut dengan *agency problem* (Jensen dan Meckling, 1976). Komite audit berperan membantu dewan komisaris dalam tugas pengawasan. Hal tersebut membantu pencegahan masalah keagenan yang terjadi sebagai akibat adanya perbedaan kepentingan antara pihak prinsipal dan agen, seperti celah untuk melakukan kecurangan untuk memenuhi kepentingan individu atau kelompok (Salim dan Marietza, 2017).

Komite audit yang beranggotakan komisaris independen diharapkan mampu melaksanakan tugasnya terutama yang berkaitan

dengan kebijakan akuntansi perusahaan, pengawasan internal, dan sistem pelaporan keuangan, sehingga dapat mengurangi kecurangan dan kemungkinan manipulasi (Darmawan, 2018). Komite audit independen dalam perusahaan dapat menjadi salah satu upaya dalam meningkatkan integritas laporan keuangan. Selain itu, komite audit independen diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap tindakan manajemen yang memungkinkan untuk melakukan manipulasi terhadap laporan keuangan. Semakin tinggi proporsi komite audit independen maka semakin tinggi tingkat integritas laporan keuangan suatu perusahaan (Saksakotama dan Cahyonowati, 2014).

Hasil penelitian terdahulu oleh Yuliana dkk (2019), Maghfiroh dkk (2018), Lestari dkk (2018) serta Verya (2017) menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan. Berdasarkan pengembangan teori dan hasil penelitian terdahulu, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃ : Komite audit berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan.

4. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Integritas Laporan Keuangan

Menurut Jensen dan Meckling (1976), kepemilikan institusional juga merupakan alat yang dapat digunakan untuk mengurangi *agency conflict*. Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena dengan adanya kepemilikan oleh

institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Tindakan pengawasan oleh investor institusional dapat mendorong manajer untuk lebih memfokuskan perhatiannya terhadap kinerja perusahaan sehingga akan mengurangi perilaku mementingkan diri sendiri (opportunistik). Adanya kepemilikan institusional yang tinggi membatasi manajer untuk melakukan pengelolaan laba sehingga dapat meningkatkan integritas laporan keuangan (Darmawan, 2018).

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sukanto dkk (2018), Priharta (2017), Akram dkk (2017) serta Verya (2017) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan. Berdasarkan pengembangan teori dan hasil penelitian terdahulu, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₄ : Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan.

5. Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Integritas Laporan Keuangan

Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham oleh pihak internal atau manajemen yang sekaligus sebagai pengelola perusahaan. Jansen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa salah satu cara untuk mengurangi *agency cost* adalah dengan meningkatkan kepemilikan saham oleh manajemen. Kepemilikan manajerial juga akan mengurangi masalah keagenan, karena kepemilikan manajerial dapat membantu menyatukan

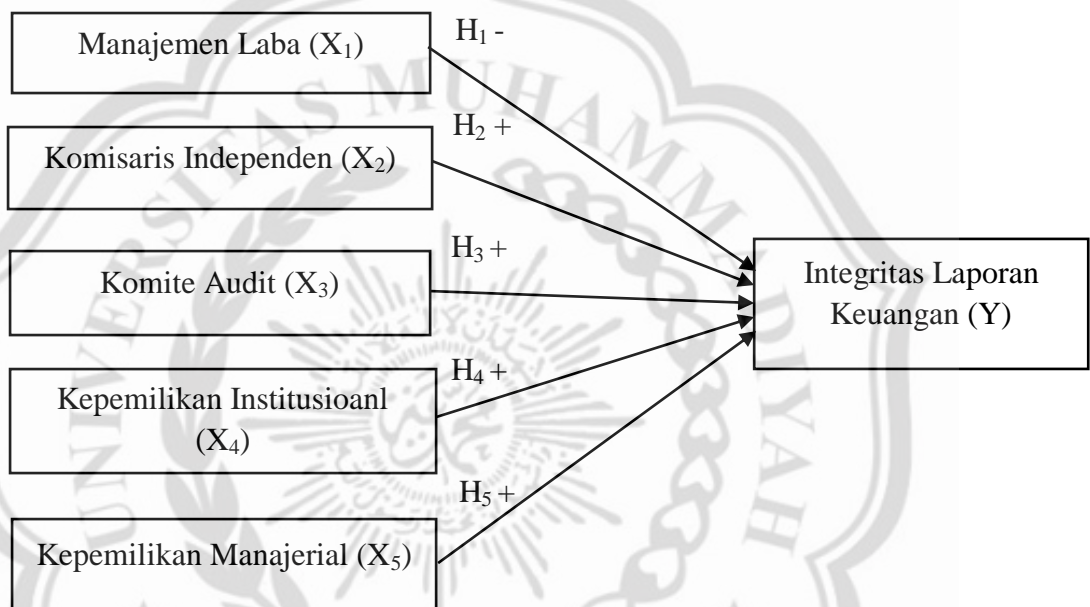
kepentingan antara manajer dengan pemegang saham, yang berarti semakin meningkat proporsi kepemilikan saham manajerial maka semakin tinggi integritas laporan keuangan. Hal ini dapat terjadi dengan memberikan saham kepada manajer maka manajer sekaligus merupakan pemilik perusahaan. Dengan adanya kepemilikan seperti ini, pihak *agen* (manajer) akan mendapat tekanan untuk lebih hati-hati dalam menyajikan laporan keuangan dan termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya yang juga merupakan keinginan dari pemilik perusahaan. Manajer juga dapat merasakan langsung manfaat dari keputusan yang diambil. (Akram dkk, 2017). Semakin besar proporsi saham yang dimiliki oleh manajemen maka semakin tinggi integritas laporan keuangan.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kartika dkk (2018), Verya (2017), Dewi dan Putra (2016) serta Saksakotama dan Cahyonowati (2014) menyimpulkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan. Berdasarkan pengembangan teori dan hasil penelitian terdahulu, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₅ : Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan.

D. Kerangka Konseptual

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hubungan antara lima variabel yaitu manajemen laba, komisaris independen, komite audit, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial dengan integritas laporan keuangan. Hubungan tersebut diuraikan dalam Gambar 2.1.



Gambar 2.1. Model Kerangka Pemikiran